

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Amrih, Avida Dewi dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2011.

Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Diana R W Napitupulu, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, UKI Press, 2025.

Dhaniswara K Harjono, *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, UKI Press, 2020.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Fred B.G. Tumbuan, “*Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998*” dalam *Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudhy A. Lontoh, Ed, Bandung, Alumni, 2001.

- Hartini Rahayu, *BUMN PERSERO: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lexi J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosada Karya, 2000.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2008,
- M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006.
- Moh. Nazir *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta, Erlangga, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- R.H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- Siti Rahayu Hartini, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan IV, Jakarta, Grafiti, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hak. tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*. Bandung, Alumni, 1999.
- Sutantio Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta, Seri Varia Yustisia, 1996.

Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Cetakan Pertama, Penerbit Tata Nusa, 2012.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 20/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Niaga,Smg.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 08/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg.

### C. JURNAL

Gunawan Widjaja, *Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2000.

Setiawan 1996. "*Hak Tanggungan Dan Masalah Eksekusinya*" Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XI No. 131, Agustus 1996.

Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Lex Journalica, Volume 13 Nomor 2, 2016.

### D. ARTIKEL/MEDIA

Franklin Montölalu "*Kajian Hukum Terhadap pdf kajian hukum terhadap pemegang hak tanggungan dari debitor yang telah dinyatakan pailit*". Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Harnoto Roseno. "*Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*", 2008, [www.Tesis/pdf/B4B006080/undip.2008](http://www.Tesis/pdf/B4B006080/undip.2008), diakses pada tanggal 15 April 2025.

Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang*

*Ketenagakerjaan*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU*. KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020.

Problematika eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan, <https://pn-pulangpisau.go.id/AcTeGEhLOpDA9zo15dfIMx3sCqjU4RSbrwnB8kP2ZauVlm6FNig7QyXWYH0KvJt>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

Siti Heiranisya Cita Agca. 2013. Jurnal. pdf, "harmonisasi pasal 21 undang undang hak tanggungan dengan pasal 56 dan pasal 59 undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terkait kreditor separatis pemegang hak tanggungan yang melekat pada benda jaminan", Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013.